

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kawasan Timur Tengah hampir tidak pernah berhenti menjadi bahan berita media massa maupun sebagai bahan pembicaraan di berbagai forum. Pergolakan politik baik yang berskala lokal maupun regional seakan-akan muncul silih berganti. Karena sebelum terbentuknya Liga Arab, di kawasan tersebut terjadi kesenjangan perekonomian yang sangat tinggi antara negara-negara yang mempunyai sumber daya minyak yang besar dengan negara-negara yang mempunyai sumber daya minyak yang kecil. Karena hal-hal semacam inilah banyak terjadi konflik-konflik antara negara-negara Arab.

Dari serangkaian konflik yang terus melanda kawasan Timur Tengah, terutama konflik Israel-Palestina, telah membuka mata dunia bahwa konflik dan pertentangan yang terjadi bukan hanya sekedar masalah perebutan wilayah, tetapi juga melibatkan unsur-unsur ideologi, kepentingan-kepentingan politik dan pengaruh global dari negara adikuasa.

Sehubungan dengan konflik paling krusial di kawasan Timur Tengah yaitu konflik Israel-Palestina, Liga Arab sebagai lembaga regional di kawasan tersebut telah mengambil sikap tegas yang tertuang dalam Deklarasi Liga Arab terhadap Invasi ke Palestina yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1948,

Palestina pada tanggal 14 Mei 1948.¹ Isi deklarasi itu menegaskan sikap Liga Arab yang menolak keras didirikannya nagara Yahudi di tanah Palestina dan tetap akan mendukung perjuangan Palestina untuk mendapatkan kembali wilayah mereka. Deklarasi ini diteruskan dengan pengiriman pasukan dari anggota Liga Arab antara lain Mesir, Jordania, Syria dan Lebanon, untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Palestina. Liga Arab juga mengeluarkan beberapa resolusi menyangkut masalah Palestina. Namun tampaknya resolusi tersebut tidak efektif karena konflik tetap saja terjadi sampai sekarang tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Di perparah lagi dengan komitmen Liga Arab untuk membantu Palestina makin hari makin berkurang. Para anggota Liga Arab sekarang ini lebih mementingkan kepentingan nasional mereka dan melupakan rakyat Palestina. Rakyat Palestina harus berjuang sendiri sampai sekarang untuk mendapatkan kemerdekaan mereka kembali.

Liga Arab merupakan salah satu organisasi regional yang mewadahi bangsa-bangsa Arab yang diharapkan organisasi ini bisa menjadi tempat rembuk dari anggota-anggotanya, baik dalam melakukan kerjasama antar anggota maupun dalam penyelesaian konflik. Liga Arab didirikan di Kairo, Mesir, pada 22 Maret 1945, enam bulan sebelum terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), oleh tujuh negara Arab yaitu Mesir, Arab Saudi, Jordania, Suriah, Irak, Lebanon dan Yaman.² Dengan tujuan sebagai penengah

¹ Lihat dalam draft *Arab League Declaration on the Invasion of Palestine* pada website www.al-bab.com/arab/league.htm

² George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs*, alih bahasa Drs. Asgar Bixby (Timur

perselisihan antara negara-negara anggota, Liga Arab dinilai gagal menangani sengketa antar negara Arab. Pada perkembangannya Liga Arab tidak mampu lagi melaksanakan resolusi, bahkan menghasilkan resolusi, dan lebih sering terjebak dalam jalan buntu. Apalagi dalam membentuk satu front yang utuh untuk menghadapi ancaman dari luar karena perbedaan yang tajam antara pemimpin masing-masing negara anggota.

Dengan melihat permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk membahas dan kemudian mengambil judul tentang “Ketidakefektifan Organisasi Liga Arab dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina”.

B. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang efektifitas Liga Arab dalam mengatasi atau menyelesaikan konflik antar negara-negara di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina. Selain itu juga, penelitian ini dimaksudkan untuk menerapkan teori maupun konsep yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Tujuan yang tak kalah penting adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Ketika berbicara tentang negara-negara Arab maka akan terbayang

tersebut, baik konflik internal dalam negara atau separatisme, maupun konflik antar negara untuk memperebutkan wilayah kekuasaan.

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sekurang-kurangnya terdapat tiga masalah besar yang dihadapi kawasan Timur Tengah.³ Ketiga masalah yang dimaksud adalah : pertama, berlanjutnya ketegangan di kawasan Teluk Parsi, sebagai akibat berlarut-larutnya penyelesaian masalah pendudukan Irak oleh Amerika. Kekuatan Amerika dan Inggris terus berusaha melumpuhkan kekuatan pejuang Irak melalui berbagai macam aksi-aksi militer yang terus berlangsung hingga kini dan telah mengakibatkan jatuhnya korban dikalangan ribuan warga sipil Irak. Namun aksi-aksi militer Amerika yang berlandung di balik slogan "pembebasan dan demokrasi" itu ternyata tidak juga membawa hasil sebagaimana yang mereka harapkan. Terbukti masih kuatnya kelompok-kelompok pejuang Irak anti Amerika dan tidak tampak tanda-tanda mereka akan tunduk pada tekanan Amerika. Oleh sebab itu, Amerika kemudian mengubah kebijakan terhadap Irak, dari suatu kebijakan yang semula bertujuan menjatuhkan kekuasaan Saddam Husein, kemudian menjadi kekuatan neo-kolonial di Irak. Sudah tentu sikap Amerika ini ditolak mayoritas negara Arab, termasuk negara yang selama ini bersekutu erat dengan Washington. Mereka kendati tidak menyukai sosok Saddam, namun menganggap apa yang dilakukan Amerika di Irak belakangan ini sudah terlalu jauh karena mencampuri persoalan politik domestik disebuah negara yang berdaulat. Bahkan tuduhan Amerika kepada Saddam sebagai

³ K... Palestine Journal (Disampaikan dalam acara Training Sehari Palestina di COMES, 30

pengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan justru semakin menegaskan politik standar ganda Washington sendiri, karena Amerika terbukti tidak pernah bertindak apapun terhadap pangsanggu stabilitas keamanan dan perdamaian Timur Tengah yang sesungguhnya, yaitu Israel.

Masalah kedua, adalah semakin menguatnya desakan bagi demokratisasi dan reformasi politik di kawasan Timur Tengah. Di negara-negara Timur Tengah non Arab, demokratisasi dan reformasi pada umumnya telah berlangsung. Sebaliknya di dunia Arab, demokratisasi dan reformasi politik justru berjalan dengan lamban. Ini misalnya terlihat dari kasus pembatalan pemilu oleh rezim militer di Aljazair (1992) yang ironisnya justru didiamkan saja oleh dunia barat.

Masalah terakhir tapi yang paling penting adalah konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung sejak tahun 1948 (kalau ditelusuri lebih jauh bahkan sudah mulai lama sebelum itu), dan telah menjadi induk dari permasalahan di kawasan Timur Tengah. Bahkan dikhawatirkan akan terjadi eskalasi konflik akibat keengganan Israel di bawah kepemimpinan tokoh garis keras PM Ariel Sharon (dari Partai Likud) untuk menaati setiap perjanjian yang sudah disepakati. Situasi ini bertambah eksplosif dengan makin tidak jelasnya pembentukan negara Palestina merdeka. Pasalnya rencana pembentukan negara Palestina ini ditentang keras oleh Israel yang didukung oleh Amerika, negara yang selalu mengklaim menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) namun justru menolak hak

Meninggalnya Presiden Otoritas Palestina Yasser Arafat pada 11 November 2004 lalu, yang selama ini dikenal sebagai politisi handal, tampaknya semakin mempersulit penyelesaian masalah Palestina.

Dalam situasi ini, Liga Arab sebagai lembaga regional yang bertugas menjaga perdamaian kawasan Timur Tengah, harus bisa menunjukkan eksistensinya. Liga Arab bukan merupakan lembaga politik yang mampu bertindak sendiri atau menguasai sistem internasional. Efektifitasnya ditentukan oleh kualitas politik dan rasa kebersamaan serta solidaritas para anggotanya

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, keefektifan Liga Arab sangat diperlukan, karena Palestina merupakan masalah utama yang menjadi *All-Arab core concern* atau masalah bersama bangsa Arab. Latar belakang didirikannya Liga Arab salah satunya didorong oleh kecemasan para pemimpin Arab akan ancaman zionisme yahudi yang saat itu sudah mendekati berhasil. Dan saat gerakan zionis tersebut akhirnya berhasil dengan diproklamirkannya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948, Liga Arab merupakan lembaga yang menolak keras dan tidak mengakui didirikannya negara Israel di tanah Palestina. Palestina merupakan salah satu anggota Liga Arab, jadi seperti yang tertuang dalam piagam Liga Arab pada poin tiga dimana Liga Arab dipercaya untuk mengkoordinasikan rencana-rencana politik negara-negara anggota demi mempertahankan kemerdekaan dan

apapun. Jadi merupakan kewajiban Liga Arab untuk membantu bangsa Palestina dari agresi Israel dengan cara apapun.

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab dalam agendanya selalu membahas tentang konflik Israel-Palestina dan resolusi yang tepat untuk penyelesaiannya. KTT kedua yang dilaksanakan di Khortum pada tahun 1967 telah menghasilkan suatu resolusi bersama yang menegaskan lagi penolakan atas berdirinya negara Israel. Negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab sepenuhnya tidak mengakui eksistensi pihak Israel di kawasan Timur Tengah baik secara *de facto* maupun *de jure*. Resolusi ini mengikat negara anggota Liga Arab. Kemudian dalam KTT di Rabat tahun 1974, Liga Arab menghasilkan keputusan tentang pengakuan PLO sebagai wakil sah atas rakyat Palestina. Gerakan PLO hanya dianggap teroris oleh Israel dan negara-negara barat.

Namun apa yang terjadi, ketika resolusi-resolusi tersebut telah disepakati oleh anggota Liga Arab, nyatanya tidak terimplementasikan dengan baik, bahkan anggota Liga Arab yang telah menyepakatinya sendiri yang juga melanggarnya. Mesir yang selama ini menjadi leader negara-negara Arab pada kenyataannya mengingkari cita-cita bersama negara Arab dengan mengadakan perjanjian perdamaian dengan Israel. Perundingan antara Presiden Mesir Anwar Sadat dengan Perdana Menteri Menachem Begin di Camp David, Amerika, yang ditengahi oleh Presiden Amerika John F. Kennedy. Dalam perundingan ini Mesir mendapatkan kembali Sinai tetapi konsekuensi dari pengembalian Sinai tersebut Mesir harus mengakui eksistensi negara Israel

Hubungan diplomatik antara Israel dan Mesir ini jelas melanggar dari piagam dan prinsip Liga Arab, serta melanggar resolusi yang telah disepakati dalam KTT tahun 1967 tentang penolakan negara Arab terhadap eksistensi negara Israel.

Apabila ditinjau dari segi kepentingan nasional (dan pribadi), langkah Presiden Anwar Sadat tersebut dapat dimengerti, karena demi untuk kepentingan domestik Mesir. Tetapi jika dilihat dari sudut yang lebih luas, apa yang dilakukan Presiden Anwar Sadat tersebut jelas sangat merugikan perjuangan bangsa Arab Palestina dalam menghadapi Israel. Maka tidak heran jika Liga Arab yang disponsori oleh negara-negara Arab garis keras seperti Suriah, Libya, Aljazair, Yaman Selatan, dan Irak, sepakat mengeluarkan Mesir dari Organisasi tersebut. Negara-negara anggota juga sepakat untuk memutuskan semua bentuk hubungan politik dan ekonomi dengan Mesir dalam KTT yang diadakan di Bagdad, Irak tahun 1979.⁴

Pada pelaksanaan KTT di Fez, Maroko, tahun 1982, negara-negara Arab mengadakan rencana perdamaian dengan Israel atas wilayah-wilayah negara-negara Arab yang menjadi sengketa sejak tahun 1967. KTT ini menghasilkan pengakuan berdirinya negara Palestina dan menciptakan perdamaian di antara negara-negara di kawasan tersebut. Adanya rencana perdamaian Arab-Israel secara implisit berarti juga pengakuan atas berdirinya negara Israel. Inkonsistensi Liga Arab terhadap resolusi terdahulu yang telah disepakati mulai terlihat dalam hasil KTT tersebut.

negara Arab lain yang ditentukan kemudian, untuk menyosialisasikan proposal damai Arab pada masyarakat internasional.

Namun tidak adanya terobosan baru dan tindak lanjut terhadap proposal damai tersebut, membuat proses perdamaian di Timur Tengah tidak menemui perkembangan. Tugas troika Arab untuk menyosialisasikan proposal damai tersebut kepada masyarakat internasional, praktis gagal sebelum mereka melaksanakan tugasnya. Ironisnya Israel sudah menolak mentah-mentah proposal damai Arab itu sejak diumumkan.

Agaknya masih perlu waktu untuk melihat konsistensi negara-negara Arab dalam melaksanakan apa yang telah mereka sepakati dalam resolusi-resolusi tersebut.

D. Pokok Permasalahan

“Mengapa Liga Arab tidak efektif dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina ?”.

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Liga Arab merupakan sebuah institusi internasional. Institusi internasional adalah sebuah aturan yang eksplisit dan di negosiasikan di antara aktor-aktor internasional yang menyarankan, melarang, dan atau mengatur tingkah laku anggotanya. Setidaknya ada empat hal yang dapat dilakukan oleh sebuah institusi internasional dan regional dalam mencegah atau

norma dan peraturan regional yang berdasarkan pada norma-norma internasional. Yang kedua adalah menciptakan struktur pendukung yang mampu mendorong negara-negara anggota untuk menaati peraturan dan norma yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah dengan menjaga agar negara-negara anggota tetap pada komitmen mereka. Yang keempat adalah dengan mengambil pendekatan *problem solving* sehingga akan lebih mudah menyelesaikan segala perbedaan yang ada di antara negara-negara anggota sebelum perbedaan tersebut berubah menjadi konflik terbuka.⁵ Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh suatu institusi internasional melalui diplomasi resmi mereka seperti melakukan mediasi, negosiasi, mengirim utusan khusus, hingga melakukan pemutusan hubungan dan mengadakan diplomasi koersif.

Pernyataan sikap dan pengeluan resolusi adalah satu bentuk dari usaha yang dapat dilakukan oleh institusi internasional dalam menghadapi konflik. Dengan pernyataan sikap, institusi tersebut secara jelas menempatkan dirinya di dalam konflik tersebut, apalagi sebagai pendukung salah satu pihak yang berkonflik atautkah sebagai pihak ketiga yang berusaha mencari jalan keluar dari konflik tersebut. Kemudian dengan mengeluarkan resolusi berarti institusi telah berkomitmen untuk melakukan sesuatu terhadap konflik yang berlangsung dengan langkah-langkah yang telah tercantum di dalam resolusi tersebut.

Mengeluarkan suatu pernyataan sikap maupun mengeluarkan sebuah resolusi tidak cukup untuk mengatasi suatu konflik, terlebih jika konflik

⁵ Connie Peck, *The Role of Regional Organizations In Preventing and Resolving Conflict*

tersebut adalah suatu konflik yang berkepanjangan. Untuk berhasil mengatasi konflik, suatu institusi tidak hanya dituntut untuk efektif dalam mengkoordinasikan semua potensi yang ada untuk meredakan konflik tersebut. Dan ini berarti juga efektif dalam menekankan anggotanya agar menjalankan aturan dan keputusan yang telah di keluarkan.

Untuk menggambarkan ketidakefektifan resolusi Liga Arab dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina, maka akan digunakan Konsep Efektifitas. Efektifitas adalah suatu tahapan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.⁶

Konsep Efektifitas

Menurut Oran .R. Young dalam tulisannya yang berjudul *The Effectiveness of International Institutions : Hard cases and Critical variables*, efektifitas suatu institusi internasional adalah suatu hal yang dapat diukur. Untuk mengukur efektifitas suatu institusi, Young mengajukan sebuah metode yaitu dengan mencari apa yang disebut sebagai *Hard Case*, yakni suatu kondisi di mana anggota institusi memiliki baik insentif maupun kesempatan untuk mengabaikan dan atau mengubah aturan-aturan yang telah di sampaikan oleh institusi.⁷ Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu *Hard Case* muncul. Tiga yang paling utama adalah sebagai berikut :

1. Satu atau lebih anggota utama dari institusi di perkirakan tidak menyetujui hasil yang akan di keluarkan oleh rejim.

⁶ Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985, hal. 206.

⁷ Oran Young, *The Effectiveness of International Institutions : Hard Case and Critical Variables* (Cambridge University Press, 1992), hal. 161-162

2. Tidak ada deteksi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran atau bukti-bukti yang menunjukkan pembangkangan terhadap aturan institusi sulit untuk didapat.
3. Terjadinya perubahan pada karakter masyarakat internasional yang mengakibatkan munculnya keraguan atas sosio-politik atau intelektual dari rejim tersebut.

Setelah mendapatkan suatu *hard case* kemudian dapat dianalisa apakah dalam *hard case* tersebut institusi internasional yang bersangkutan tetap efektif berperan dalam menjalankan tugasnya. Untuk menentukan dapat dipergunakan beberapa kriteria yaitu:

1. Apakah organisasi tersebut dapat mengeluarkan resolusi ?
2. Apakah resolusi atau aturan yang dikeluarkan oleh institusi di implementasikan, dipatuhi, dan dipertahankan oleh negara-negara anggotanya ?

Jika suatu institusi internasional berhasil mengeluarkan sebuah resolusi saat menghadapi *hard case* dan resolusi tersebut di implementasikan, dipatuhi dan di pertahankan oleh negara-negara anggotanya, berarti institusi tersebut efektif dan berperan. Sebaliknya jika resolusi atau aturan tersebut tidak dilaksanakan, di patuhi dan di pertahankan berarti institusi tersebut tidak efektif dan tidak berperan.

Young juga telah menyebutkan variabel-variabel apa saja yang

dapat berperan efektif dalam institusi tersebut. Variabel-variabel tersebut adalah :

1. Intellectual order

Institusi internasional tidak dapat berjalan efektif dalam jangka waktu yang lama apabila substruktur intelektual yang mendasarinya runtuh atau mengalami pengikisan. Oleh karena itu peranan suatu institusi internasional bergantung pada kuat lemahnya ide atau gagasan yang mendasarinya.

Intellectual order yang mendasari pembentukan Liga Arab adalah kesatuan Arab atau yang sering disebut Pan Arabisme. Ide awal untuk membentuk Liga Arab adalah dari Mesir, saat itu Mesir dan beberapa negara Arab lainnya menginginkan terbentuknya kerjasama yang lebih erat antar negara tanpa harus kehilangan kedaulatan dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Dan juga untuk mengatasi *All-Arab core concern* atau masalah bersama bangsa Arab yaitu Palestina.

Pada masa Gamal Abdul Nasser, Pan Arabisme berkembang menjadi ide yang sangat dominan di dunia Arab. Namun semenjak Nasser meninggal dan digantikan Sadat yang lebih mementingkan kepentingan nasional Mesir tanpa memandang kepentingan Arab secara luas, Pan Arabisme menjadi luntur.

Pada perkembangannya bangsa-bangsa Arab kemudian tidak menganggap penting lagi tentang kesatuan Arab. Ini menyebabkan Liga

serius, dan lebih mementingkan kepentingan nasional mereka. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya, karena semakin hilangnya kepedulian bangsa Arab terhadap sesamanya khususnya terhadap bangsa Palestina.

Jadi jika suatu institusi internasional kehilangan ide atau gagasan yang melandasi pembentukannya maka institusi internasional tersebut akan runtuh atau hancur. Institusi internasional tersebut tidak akan berjalan efektif dalam mengeluarkan resolusi dan mengimplementasikannya dengan baik.

2. Interdependence

Efektifitas suatu institusi internasional tergantung pada tingkat ketergantungan antar anggotanya. Ketergantungan atau interdependensi timbul apabila aksi dari satu anggota suatu sistem sosial mempengaruhi kesejahteraan anggota lain dalam sistem tersebut. Mereka yang saling tergantung akan terpengaruh dan oleh karenanya sangat sensitif terhadap perilaku satu sama lain. Semakin tinggi tingkat ketergantungan, semakin nyata tumbukan kepentingan antar pihak dan reaksi yang terjadi atas tumbukan tersebut.

Ada dua jenis ketergantungan yaitu *eksternal interdependencies* dan *internal interdependencies*. *Internal interdependencies* adalah ketergantungan yang terjadi di dalam lingkungan internal anggota individu kelompok sosial, sedangkan *eksternal interdependencies* adalah

Jika *eksternal interdependencies* lebih kuat daripada *internal interdependencies*, maka para pengambil kebijakan akan lebih memusatkan perhatian mereka pada interaksi antar anggota masyarakat internasional. Meningkatnya *eksternal interdependencies* mengakibatkan dua keuntungan bagi aktor-aktor untuk membentuk suatu institusi internasional dan mematuhi aturan yang ditentukan oleh institusi tersebut. Yang pertama, dalam dunia yang saling tergantung aktor tidak akan lagi mengejar kepentingan mereka tanpa berusaha menyesuaikan diri dengan aktor-aktor lain. Disaat inilah aturan institusional muncul dan berkembang sebagai sarana bagi aktor-aktor untuk memperkecil intervensi bersama dan sekaligus sebagai sarana untuk meramalkan tingkah laku pihak lain dalam sistem sosial tersebut.

Yang kedua, meningkatnya ketergantungan juga akan memperkuat kapasitas tiap anggota sistem sosial untuk membalas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Ini akan membuat setiap negara anggota segan untuk melakukan pelanggaran dan pada akhirnya meningkatkan efektifitas peraturan ataupun resolusi yang dikeluarkan oleh institusi tersebut.

Namun sebaliknya, jika *internal interdependencies* lebih kuat dari pada *eksternal interdependencies* maka anggota masyarakat internasional akan disibukkan dengan urusan domestik mereka dan tidak banyak menaruh perhatian terhadap urusan internasional bahkan masalah dari

organisasi Liga Arab. Hilangnya ketergantungan mereka terhadap organisasi membuat para anggota seakan-akan tidak peduli dan tidak takut melanggar peraturan organisasi.

Liga Arab sebagai sebuah lembaga regional di Timur Tengah selama ini tidak berperan dalam menangani konflik regional di kawasan tersebut. Hilangnya rasa ketergantungan memperlemah kapasitas tiap anggota sistem sosial untuk membalas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, dengan kata lain hilangnya rasa solidaritas antar anggota. Ini akan membuat setiap negara anggota tidak segan untuk melakukan pelanggaran dan pada akhirnya menurunkan efektifitas peraturan internasional atau resolusi yang telah disepakati dan dikeluarkan oleh institusi tersebut.

3. Balance of Power

Ketimpangan yang tajam dalam distribusi kekuasaan diantara anggota akan membatasi peranan sebuah institusi internasional. Kekuasaan yang dimaksud disini diartikan sebagai penguasaan terhadap sumber daya, baik sumber daya alam, kekayaan finansial atau hal-hal material lainnya. Ketimpangan ini mengurangi peranan institusi karena akan ada sekelompok anggota yang dapat mengabaikan aturan yang dikeluarkan jika tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Terlebih lagi ketimpangan yang tajam juga akan mendorong timbulnya rasa tidak suka pada anggota yang lain yang dapat meningkat grastis dan meruntuhkan institusi saat anggota dominan yang semula menguasai institusi tersebut jatuh

Sebaliknya semakin berimbang pembagian kekuasaan di antara anggota suatu institusi, semakin sulit pula untuk mencapai suatu kesepakatan, akan tetapi bila suatu kesepakatan tersebut berhasil disetujui oleh anggota, maka kesepakatan tersebut akan sangat efektif karena tidak ada anggota yang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melawannya.

Pembagian kekuasaan dalam Liga Arab pada awal mula berdirinya Liga Arab terpusat ada Mesir (dengan kemampuan militer dan ekonominya yang lebih kuat. Namun seiring dengan terjadinya perkembangan politik di Timur Tengah, posisi tersebut bisa dibilang kosong, apalagi semenjak Nasser meninggal dan Mesir kemudian dikucilkan dunia Arab karena melakukan perundingan dengan Israel. Ada kekuatan-kekuatan baru yang bersaing, apalagi yang memiliki sumber daya minyak yang kaya seperti Arab Saudi.

Negara-negara Arab berlomba-lomba untuk menjadi kekuatan yang dominan di kawasan Timur Tengah, menganggap bahwa negara mereka yang paling kuat, dan mengabaikan masalah Arab yang lebih luas. Krisis ini sangat mengkhawatirkan karena akan mengakibatkan turunnya efektifitas Liga Arab dalam mengeluarkan resolusi karena perbedaan tajam antar anggotanya.

Saat ini dunia Arab terus bergelut dalam suatu paradoks, antara keinginan untuk menyatukan negara-negara Arab yang ada dengan tidak adanya kesamaan visi dan kerelaan elit politik pemimpin negara-negara Arab

untuk menyerahkan otoritas dan kekuasaan mereka. Tidak saja pertikaian antar negara Arab yang terus berkecamuk namun Liga Arab juga telah gagal dalam menghadapi gerakan zionis yang telah sukses mendirikan negara Israel di tengah-tengah wilayah mereka. Liga Arab telah kehilangan peranannya dan mengalami penurunan efektifitas yang serius, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian Camp David I di tahun 1979.

Perjanjian damai antara Mesir dan Israel ini tidak hanya merupakan bentuk pengkhianatan Mesir terhadap sikap bangsa Arab terhadap pendudukan Palestina oleh Israel yang tercermin dalam deklarasi tahun 1948. Perjanjian ini sebagai tanda awal hilangnya solidaritas negara Arab. Perjanjian ini juga mengakibatkan Mesir dikeluarkan dari Liga Arab dan di kucilkan oleh negara-negara Arab lainnya. Hal ini menimbulkan kemunduran besar bagi perjuangan Arab Palestina untuk meraih kemerdekaanya.

Penurunan efektifitas akibat runtuhnya intellectual order serta hilangnya ketergantungan ini kemudiani diperparah dengan kapabilitas pemerintah negara-negara Arab yang lemah serta distribusi kekuasaan yang sangat timpang. Apalagi ditambah dengan pengaruh Amerika Serikat yang sangat dominan terutama di kawasan Teluk. Hal-hal tersebut menyebabkan hilangnya rasa solidaritas antar bangsa Arab. Ini membuat tingkat efektifitas Liga Arab sebagai suatu organisasi regional menurun karena Liga Arab tidak

1. Liga Arab sebagai faktor yang menghambat resolusi dan lebih

Para pemimpin bangsa Arab cenderung mengabaikan *All-Arab core concern* dan mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi kepentingan negara mereka pada level Liga Arab. Ini membuat resolusi maupun peraturan yang dikeluarkan tidak efektif karena tidak terimplementasikan dengan baik.

F. Hipotesis

Upaya-upaya yang dilakukan Liga Arab untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina ternyata belum efektif dalam menyelesaikan konflik sampai saat ini, karena faktor komitmen dan solidaritas dari anggota Liga Arab masih sangat kurang dalam melaksanakan resolusi yang telah mereka sepakati.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan skripsi ini lebih ditekankan pada analisa konflik Israel-Palestina yang mulai terjadi pada tahun 1948 dimana awal terbentuknya negara Israel di tanah Palestina, sampai pada tahun 2006 sekarang ini dimana konflik tersebut masih terjadi dengan segala perkembangan politik dan upaya-upaya damai yang telah ditempuh.

H. Metode Pengumpulan Data

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang meneliti hubungan antara

Palestina baik berupa pengeluaran resolusi maupun deklarasi dan pernyataan sikap.

BAB IV : Di dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang menyebabkan tidak efektifnya resolusi yang dikeluarkan Liga Arab dalam mengatasi konflik Israel-Palestina.